



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI (KUMHAM)
SERTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM RANGKA
MEMBAHAS KEMBALI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023**

TANGGAL 12 DESEMBER 2022

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 12 Desember 2022
W a k t u	: Pukul 11.35 WIB s/d 12.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Membahas kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 1. Anggota: Fisik 31 Orang, Virtual 43 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota. 2. Undangan: - Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM) - PPUU Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM) dan PPUU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka membahas kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
2. Rapat dibuka pada pukul 11.35 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan

Menteri Hukum dan HAM yang serta Pimpinan PPUU DPD untuk menyampaikan pandangan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

II. POKOK PEMBAHASAN.

A. Pengantar Ketua Rapat dalam rangka membahas kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023:

Terkait dengan materi rapat hari ini dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 khususnya terkait dengan usulan tambahan RUU dari Komisi V DPR RI mengenai revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang telah disepakati fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus dan menugaskan kembali kepada Badan Legislasi untuk dibahas kembali.

B. Pandangan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 berjumlah 32 (tiga puluh dua) RUU;
2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 berjumlah 41 (empat puluh satu), dengan perincian:
 - 26 (dua puluh enam) RUU usul DPR;
 - 12 (dua belas) RUU usul Pemerintah, termasuk RUU Perubahan atas Undang-Undang Ibukota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - 3 (dua) RUU usul DPD; dan
3. Prolegnas Jangka Menengah 2020 -2024 sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) RUU.
4. Mendasarkan pada hasil tersebut, pada prinsipnya Kami atas nama Pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam Rapat Kerja.
5. Pemerintah juga ingin mendorong pengusulan RUU Kelautan (sebagai Prakarsa DPD) untuk dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023 untuk memperkuat peran Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Mengingat waktu yang sudah dipenghujung tahun, maka kami berharap agar hasil Rapat Kerja pada hari ini dapat segera ditetapkan dalam rapat Paripurna pada Tahun 2022. Selain itu kami juga berharap kerja sama antara Baleg DPR-RI, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Undang Undang yang berkualitas.

C. Pandangan PPUU DPD dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Dalam catatan kami rapat pembahasan Prolegnas tahun ini cukup intensif dilakukan, sejak bulan 24 Agustus hingga hari ini tanggal 12 Desember 2022. Dalam rapat tanggal 20 September kita telah sepakati 38 RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, kemudian kita ubah lagi pada tanggal 23 November 2022 untuk mengakomodir RUU perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan usulan Komisi V.
2. Dalam kesempatan yang sama Pemerintah menyampaikan 2 usulan baru untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, RUU tentang perubahan UU tentang

2. Dalam kesempatan yang sama Pemerintah menyampaikan 2 usulan baru untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, RUU tentang perubahan UU tentang perubahan UU No. 3 tahun 022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
3. Pada rapat tanggal 23 November 2023 DPD menyampaikan kembali usulan RUU tentang perubahan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah diusulkan sebelumnya dan telah pula mendapat respon Pemerintah tetapi tetap tidak dapat masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, dengan penjelasan RUU tersebut akan di masukan setelah RUU tentang Daerah Kepulauan dibahas.
4. DPD juga berkeinginan untuk mengusulkan 1 usulan RUU dari DPD sebagai pertimbangan Prolegnas Prioritas Tahun 2023, kami menawarkan dua pilihan RUU tentang Pemerintahan Digital atau RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua RUU ini telah siap Naskah Akademik dan RUU. kami juga yakin dan percaya usulan ini sangat baik untuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah karena akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat tahun depan merupakan tahun politik, tahun menjelang Pemilu 2024 tentu periode ini DPD ingin ada legacy Undang – Undang sebagai bentuk akuntabilitas kerja Lembaga Perwakilan. Untuk daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023, sebagai berikut:
 - RUU tentang perubahan keempat atas UU MD3 PPUU berpadangan agar RUU ini dapat dipisah menjadi UU tersendiri untuk MPR, DPR dan DPD serta pengaturan untuk DPRD mungkin cukup diatur dalam UU tentang Pemerintah Daerah;
 - RUU tentang perubahan atas UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar dalam pembahasannya PPUU dapat dilibatkan karena beberapa catatan dari hasil pemantauan dan peninjauan UUPK yang telah dilakukan pada tahun 2021.

D. Pandangan Mini Fraksi-fraksi atas usulan RUU tentang LLAJ dari Komisi V, dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra
 - Fraksi Gerindra menolak RUU tentang LLAJ dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
2. Fraksi PKB
 - Fraksi PKB Menolak usulan RUU tentang LLAJ masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
3. Fraksi PPP
 - Fraksi PPP Menolak usulan RUU tentang LLAJ masuk dalam Prolegnas Tahun 2023.
4. Fraksi Golkar
 - Fraksi Golkar mengusulkan usulan RUU tentang LLAJ masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (*longlist*).

5. Fraksi PDIP
 - Fraksi PDIP menyatakan sikap menolak RUU tentang LLAJ dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
6. Fraksi NASDEM
 - Fraksi Nasdem mendukung usulan RUU tentang LLAJ dari Komisi V DPR RI masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
7. Fraksi Demokrat
 - Fraksi Demokrat menyetujui revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ untuk dimasukkan kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 mengingat begitu banyak persoalan angkutan jalan raya yang belum diakomodir didalam UU *existing*.
8. Fraksi PKS
 - Fraksi PKS berpendapat RUU revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ masuk kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai usul dari Pemerintah.
9. Fraksi PAN
 - Fraksi PAN menolak revisi RUU LLAJ untuk dimasukkan kedalam Prolegnas 2023.

E. Pimpinan Rapat

1. Setelah Fraksi-fraksi memberikan pandangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - A. Fraksi yang menolak revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai berikut:
 - Fraksi Gerindra;
 - Fraksi PKB;
 - Fraksi PPP;
 - Fraksi Golkar;
 - Fraksi PDIP; dan
 - Fraksi PAN.
 - B. Fraksi yang menerima revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai berikut:
 - Fraksi PKS dengan catatan bahwa RUU LLAJ menjadi usulan Pemerintah;
 - Fraksi Demokrat;
 - C. Dari daftar Prolegnas ada dua yang dikeluarkan yaitu RUU LLAJ dan RUU KUHP (untuk RUU KUHP sudah disahkan di Rapat Paripurna).
 - D. Terkait dengan RUU Daerah Kepulauan, PPUU DPD kiranya dapat mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI sebagai dasar permintaan RUU dimaksud.

III. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyetujui/menyepakati:

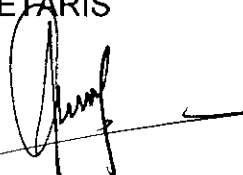
1. Mengeluarkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.
2. Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) RUU;
3. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU; dan
4. Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) RUU.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 12 Desember 2022

AN. KETUA RAPAT/

SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.

NIP. 19670127 199803 1 001